

## MODUL III MENGKOMUNIKASIKAN KEGIATAN PERTANAHAN

### A. Kegiatan Pertanian

Sesungguhnya kegiatan pertanian beraneka-ragam, sebagai contoh: ketika pelaksanaan reforma agraria, maka di dalamnya terdapat kegiatan landreform dan redistribusi tanah, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran tanah atau legalisasi asset, dan diakhiri dengan pemberian akses agar petani penerima tanah dapat menggarap tanah dengan sebaik-baiknya (produktif dan menyejahterakan).

Selain itu, pada beberapa tahun terakhir ini Badan Pertanahan Nasional memiliki program strategis yang terdiri dari: reforma agraria, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), dan pengadaan tanah. Uniknya, pada masing-masing program terdapat beberapa kegiatan yang dimaksudkan untuk mendukung kelancaran program strategis tersebut, seperti: penyuluhan pertanian, dan penggalangan partisipasi masyarakat, pelatihan *participatory mapping*, *workshop multipurpose cadastre*, dan lain-lain.

Untuk memudahkan pemahaman tentang kegiatan pertanian dapat diperhatikan kegiatan reforma agraria, *participatory mapping*, dan *multipurpose cadastre* yang telah diteliti oleh Aristiono Nugroho dan kawan-kawan, sebagai berikut:

#### 1. Reforma Agraria

Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2019 melakukan penelitian berjudul “Reforma Agraria: *Threat* Dan *Treatment* Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).” Salah satu hasil penelitian tersebut memperlihatkan, bahwa: **Pertama**, *threat* dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di Kabupaten Blitar terjadi karena legalisasi asset barulah dapat dilakukan setelah redistribusi tanah dilakukan. Sebagaimana diketahui Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar telah meredistribusikan tanah seluas 3.326 Ha pada kurun waktu tahun 2007 – 2017, yang secara bertahap juga telah melakukan legalisasi asset. Redistribusi tanah dapat semakin cepat terwujud, ketika pihak perkebunan bersedia untuk

menyerahkan sebagian tanah yang dikuasainya kepada masyarakat. Percepatan redistribusi ini pada akhirnya harus direspon dengan percepatan legalisasi asset. Tetapi percepatan legalisasi asset akan terhambat, ketika percepatan redistribusi tanah telah lebih dahulu terhambat, oleh ketidak-sediaan masyarakat menerima tanah yang dilepaskan pihak perkebunan, karena masyarakat menuntut tanah yang lebih luas.

**Kedua**, *treatment* dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di Kabupaten Blitar dilakukan sesuai dengan maksud pelaksanaan legalisasi asset, yaitu memberi penguatan hak atas tanah pada bidang-bidang tanah eks perkebunan yang telah dikuasai oleh petani. Oleh karena itu, legalisasi asset dilakukan dengan cara memperhatikan kebutuhan para petani bagi pengembangan pertanian di masa depan, termasuk adanya tanah kolektif serta penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Selanjutnya, legalisasi asset dilakukan dengan membubuhkan suatu catatan pada sertipikat, bahwa tanah hak milik pada sertipikat tersebut merupakan pelepasan dari hak guna usaha perusahaan perkebunan, dan tidak dapat dipindah-tangankan baik sebagian maupun keseluruhan selama 10 tahun.

## 2. *Participatory Mapping*

Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2018 melakukan penelitian berjudul, “*Participatory Mapping: Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur).*” Hasil penelitian tersebut memperlihatkan, bahwa: **Pertama**, pertimbangan rasional yang dibangun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun saat *participatory mapping*, sebagai berikut: (1) Rasionalitas tradisional, yang memperkuat semangat “guyub”, dalam bentuk kerjasama seluruh elemen masyarakat. (2) Rasionalitas *cost and benefit*, yang meliputi biaya sosial, ekonomi, dan teknis, serta keuntungan sosial, ekonomi, dan teknis. (3) Rasionalitas pemberdayaan masyarakat, yang meliputi beberapa upaya yang terkait dengan *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. (4) Rasionalitas pelaksanaan tugas, salah satunya adalah terlaksananya IP4T untuk mendukung pelaksanaan PTSL.

**Kedua**, format *participatory mapping* yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, sebagai berikut; (1) Format pelaksanaan, yang meliputi: (a) Deliniasi bidang tanah di atas peta kerja oleh Kamituo, dengan disaksikan dan dikonfirmasi oleh Ketua RT dan tokoh setempat. (b) *Checking* lapangan dan pengisian formulir IP4T-Partisipatif dilakukan oleh Kamituo, dengan didampingi Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Ketua RT. (c) Selanjutnya, entri data pada aplikasi IP4T-Partisipatif dilakukan oleh Operator Komputer yang khusus menangani IP4T-Partisipatif. (2) Format koordinasi, yang meliputi koordinasi di tingkat pimpinan, maupun koordinasi di tingkat pelaksanaan. (3) Format pemerintahan, yang meliputi terbitnya beberapa peraturan tingkat Kabupaten Madiun, dan kesepakatan unsur pimpinan di Kabupaten Madiun. (4) Format pendanaan, yang meliputi pendanaan pelaksanaan IP4T di 198 desa dan 8 kelurahan, serta pendanaan penyediaan citra satelit beresolusi 0,7m dan peralatan pendukung lainnya, yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Madiun, ADD wilayah Kabupaten Madiun, dan DIPA APBN Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.

**Ketiga**, pemanfaatan relasi kuasa dan transmisi nilai-nilai pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan *participatory mapping* diwujudkan dengan cara, sebagai berikut: (1) Relasi kuasa dimanfaatkan dengan cara membangun *power over relation* dan *power to relation*. (2) Transmisi nilai-nilai pertanahan dimanfaatkan dengan memperhatikan motif tindakan, hubungan dan kepercayaan, serta isi nilai-nilai pertanahan.

**Keempat**, kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan *participatory mapping*, sebagai berikut: (1) Kendala peta kerja, ketika citra satelit beresolusi 0,3m tidak didapatkan dan kemudian diganti dengan citra satelit beresolusi 0,7m. (2) Kendala pelatihan, ketika rencana pelatihan bagi 1.500 orang perangkat desa tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian diganti dengan *workshop* selama 2 hari.

**Kelima**, kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* pasca *participatory mapping*, sebagai berikut: (1) Dalam konteks *land values* atau

penilaian tanah, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk menetapkan nilai tanah dan zona nilai tanah secara tepat (obyektif, aktual, dan faktual); (2) Dalam konteks *land use* atau penatagunaan tanah, Bappeda dan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk melakukan penataan ruang dan penatagunaan tanah secara obyektif sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Kabupaten Madiun; (3) Dalam konteks *land development*, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk membangun basis data bidang tanah, yang digunakan sebagai dasar pemberian izin dan pengelolaan penanaman modal di Kabupaten Madiun; (4) Dalam konteks *land registration* atau pendaftaran tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk mendukung pelaksanaan PTSL, dengan cara: (a) memanfaatkan peta IP4T-Partisipatif sebagai peta kerja PTSL di wilayah Kabupaten Madiun, dan (b) data IP4T-Partisipatif sebagai data PTSL di wilayah Kabupaten Madiun.

### 3. *Multipurpose Cadastre*

Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2018 melakukan penelitian berjudul, "*Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest* (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah)." Hasil penelitian tersebut memperlihatkan, bahwa: **Pertama**, formula kontribusi serta partisipasi *stakeholders* dalam pembuatan dan pemanfaatan PTBT (Peta Tematik Bidang Tanah) di Kabupaten Grobogan ditetapkan melalui pembagian peran, sesuai dengan kompetensi, kemampuan, dan kewenangan masing-masing pihak, sebagai berikut: (1) Pemerintah Kabupaten Grobogan berkontribusi dan berpartisipasi sebagai pendorong pembuatan PTBT, serta pengguna dan pendorong pemanfaatan PTBT. (2) Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan berkontribusi dan berpartisipasi sebagai inisiator dan supervisor pembuatan PTBT, serta pengguna PTBT dan pendorong pemanfaatan PTBT. (3)

Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, berkontribusi dan berpartisipasi sebagai pelaksana pembuatan PTBT, dan pengguna PTBT. (4) Pihak Swasta (CV. Geodata) berkontribusi dan berpartisipasi sebagai pendukung pembuatan dan pemanfaatan PTBT, dengan menyediakan dukungan teknis berupa pelatihan dan pendampingan serta penyediaan teknologinya.

**Kedua**, multi manfaat PTBT dapat diperoleh *stakeholders* sesuai dengan kebutuhan, misalnya dalam konteks Kabupaten Grobogan, PTBT memiliki multi manfaat, sebagai berikut: (1) sebagai basis Sinden Bertapa, dan (2) sebagai dasar SBDM (*Spatial Based Decision Making*). Manfaat PTBT dapat diperoleh, bila menggunakan cara tertentu, yang berupa penggunaan teknologi GIS, misalnya, untuk: (1) penentuan keluarga miskin, (2) penentuan kebijakan kesehatan, dan (3) penentuan kebijakan pertanian.

**Ketiga**, upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, agar PTBT dapat dimanfaatkan secara optimal oleh segenap *stakeholders*, antara lain: (1) Penetapan skenario pembuatan dan pemanfaatan PTBT, sebagai berikut: (a) Pembuatan Peta Dasar Berbasis Desa/Kelurahan, pada tahun 2014; (b) Pembuatan Peta Desa Berbasis Bidang Tanah, pada tahun 2015-2017; (c) Pembuatan Peta Tematik Bidang Tanah, pada tahun 2016-2020; (d) Pembuatan WebGIS, pada tahun 2017-2020.

(2) Optimalisasi pemanfaatan PTBT, dengan cara: (a) membangun komunikasi dengan *stakeholders*, yang meliputi upaya komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan; (b) mempromosikan PTBT, yang meliputi promosi SDSS (*Spatial Decision Support System*), SBDM (*Spatial Based Decision Making*), keunggulan PTBT, dan *updating* PTBT; dan (c) memberdayakan *stakeholders*, yang meliputi *lobbying*, penyuluhan, dan pelatihan, serta pendampingan pemanfaatan PTBT.

## **B. Mengkomunikasikan Kegiatan**

Kegiatan pertanian akan mendapat dukungan banyak pihak, bila mampu dikomunikasikan dengan baik kepada banyak pihak. Untuk itu, petugas pertanian harus memiliki kemampuan berinisiatif, bersikap terbuka, bersikap asertif, dan mengatasi konflik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan deskripsi berikut ini:

### **1. Pengertian Komunikasi**

Komunikasi adalah proses interaksi antara sesama makhluk Tuhan baik dengan menggunakan simbol-simbol, maupun perilaku dan tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam berkomunikasi akan melibatkan dua pihak atau lebih, dengan menggunakan cara-cara berkomunikasi yang biasa dilakukan oleh pihak-pihak tersebut.

Dalam konteks manusia, komunikasi merupakan hal mendasar, baik manusia sebagai makhluk individual maupun manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi juga merupakan hal yang penting dalam berorganisasi atau mengelola sumberdaya manusia. Komunikasi yang tercipta di antara para anggota organisasi atau antara elit organisasi dengan anggota organisasi atau masyarakat, akan mendukung kelancaran aktivitas organisasi serta pengembangan organisasi.

### **2. Komunikasi Sosial**

#### **a. Pengertian Komunikasi Sosial**

Komunikasi sosial adalah kegiatan komunikasi yang diarahkan pada pencapaian integrasi sosial. Selain itu, komunikasi sosial juga dimaknai sebagai proses pengaruh-mempengaruhi antara individu-individu dengan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Ketika komunikasi sosial sedang atau telah dilakukan, maka individu-individu yang terlibat dalam komunikasi tersebut akan mampu membangun konsep dan aktualisasi diri.

Dalam konteks pertanian komunikasi sosial diperlukan sebagai kegiatan komunikasi yang akan diarahkan bagi terlaksananya program dan kegiatan pertanian. Selain itu, komunikasi sosial juga diperlukan sebagai proses untuk mempengaruhi masyarakat agar bersedia mendukung dan berpartisipasi dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pertanian. Ketika komunikasi sosial sedang berlangsung atau telah dilakukan, maka petugas pertanian dan masyarakat yang terlibat dalam komunikasi tersebut akan memiliki kesempatan membangun konsep dan aktualisasi diri.

Komunikasi sosial memiliki hubungan dengan budaya, karena fungsinya justru merupakan fungsi budaya (*cultural*). Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan sebaliknya komunikasi berkontribusi dalam menemukan, memelihara, mengembangkan, dan menawarkan budaya kepada banyak pihak. Slogannya yang populer yaitu, “Budaya adalah komunikasi, dan komunikasi adalah budaya.”

Pada satu sisi komunikasi merupakan cara mensosialisasikan norma budaya secara horizontal (dari masyarakat kepada masyarakat) dan secara vertikal (dari suatu generasi kepada generasi berikutnya). Kemampuan manusia berkomunikasi menjadi mereka mampu melakukan pengikatan waktu (*time binding*). Hal ini merujuk pada kemampuan manusia untuk mewariskan ilmu dan pengetahuan dari generasi ke generasi. Pengikatan waktu merupakan karakteristik yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya. Dengan kemampuan tersebut manusia mampu mengendalikan dan mengubah lingkungan mereka.

Kendala komunikasi pada suatu kelompok budaya tertentu biasanya muncul ketika kelompok budaya tersebut memiliki perangkat norma yang berlainan antara generasi tua dengan generasi mudanya. Oleh karena itu, kematangan budaya dibutuhkan untuk menghidup-hidupkan toleransi atas adanya berbagai perbedaan. Sementara itu, konsep diri dipengaruhi oleh keluarga, dan orang-orang dekat atau kerabat. Mereka inilah yang akan mendorong munculnya kematangan budaya pada diri seseorang, sehingga yang bersangkutan mampu mengatasi kendala komunikasi secara arif.

#### b. Fungsi Komunikasi Sosial

Komunikasi sosial bertujuan untuk mewujudkan integrasi bangsa dan integrasi sosial, yaitu terciptanya rasa aman yang diperoleh dari ikatan sosial

yang kuat, dengan mengorbankan sebagian kepentingan individu demi terwujudnya kepentingan bersama. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, penghambat integrasi bangsa dan integrasi sosial, antara lain: (1) adanya hambatan komunikasi antar generasi, (2) adanya komunikasi internasional yang merusak integrasi bangsa dan integrasi sosial, dan (3) adanya ketimpangan sosial yang muncul pasca pembangunan fisik di wilayah-wilayah tertentu.

Oleh karena itu komunikasi sosial memiliki fungsi, sebagai berikut: **Pertama**, membentuk konsep diri yang bersangkutan, yaitu pandangan orang tersebut terhadap dirinya sendiri, setelah ia memperoleh informasi tentang dirinya dari orang lain (*significant others* atau *affective others*). **Kedua**, menyatakan eksistensi diri atau aktualisasi diri yang bersangkutan, yang biasanya ditunjukkan dengan cara berkomunikasi. **Ketiga**, mempertahankan kelangsungan hidup yang bersangkutan, dengan cara berkomunikasi, agar orang lain berkenan memenuhi kebutuhan hidupnya.

### 3. Komunikasi Interpersonal

#### a. Pengertian Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah: **Pertama**, komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang dilakukan secara kontak langsung dalam bentuk percakapan atau dialog. **Kedua**, komunikasi tatap muka atau face to face communication, yaitu komunikasi yang berlangsung dengan cara berhadapan satu sama lain, sehingga respon lawan komunikasi dapat diketahui secara langsung. **Ketiga**, proses pertukaran informasi antara seseorang dengan orang lain. **Keempat**, proses penyampaian berita yang dilakukan oleh seseorang dan diterimanya berita tersebut oleh orang lain.

Dalam konteks pertanian, komunikasi interpersonal diperlukan sebagai bentuk komunikasi yang terjadi antara petugas pertanian dengan masyarakat, yang dilakukan secara kontak langsung dalam bentuk percakapan atau dialog. Selain itu, komunikasi interpersonal diperlukan sebagai bentuk komunikasi tatap muka atau *face to face communication*, yang berlangsung antara petugas pertanian dengan masyarakat, di mana respon masing-masing pihak yang



berkomunikasi dapat diketahui secara langsung. Ada pula pandangan yang menyatakan, bahwa komunikasi interpersonal diperlukan sebagai bentuk pertukaran informasi antar petugas pertanahan, atau antara petugas pertanahan dengan masyarakat. Tidak boleh pula diabaikan pendapat yang menyatakan, bahwa komunikasi interpersonal diperlukan sebagai bentuk penyampaian berita yang dilakukan oleh petugas pertanahan kepada masyarakat.

Alo Liliweri dalam “Komunikasi Antar Pribadi” (1997:62) sempat mengungkapkan pandangan Dean C. Bamlund tentang komunikasi interpersonal. Pada kesempatan tersebut Dean C. Bamlund kembali menegaskan, bahwa komunikasi interpersonal adakalanya dikaitkan dengan pertemuan antara dua orang atau lebih, yang dilakukan secara spontan dan tidak secara terstruktur.

#### b. Kompetensi Interpersonal

Fuad Nashori dalam “Psikologi Sosial Islami” (2008:27) menjelaskan, bahwa 73% komunikasi yang dilakukan manusia merupakan komunikasi interpersonal. Selanjutnya, Fuad Nashori menambahkan, bahwa orang yang dapat melakukan komunikasi interpersonal secara efektif disebut sebagai orang yang memiliki kompetensi interpersonal.

Sejalan dengan pandangan Fuad Nashori, Spitzberg dan Cupach telah menyatakan, bahwa kemampuan seorang individu untuk melakukan komunikasi efektif ditandai oleh karakteristik psikologis tertentu yang mendukung terciptanya relasi antar pribadi yang baik. Karakteristik ini meliputi pengetahuan tentang perilaku nonverbal orang lain, kemampuan menyesuaikan komunikasi dengan konteks, dan kemampuan psikologis lainnya (Nashori, 2008:27)

Akhirnya Fuad Nashori (2008:28-29) menyimpulkan, bahwa kompetensi interpersonal membutuhkan lima kemampuan yang harus dimiliki oleh orang yang akan berkomunikasi, yaitu: (1) kemampuan berinisiatif, (2) kemampuan bersikap terbuka atau *self-disclosure*, (3) kemampuan bersikap asertif atau mampu mengkomunikasikan hal-hal yang diinginkan dan dirasakan. (4) kemampuan memberi dukungan secara emosional, dan (5) kemampuan untuk mengatasi konflik.

c. Tujuan Komunikasi Interpersonal

Arni Muhammad dalam “Komunikasi Organisasi” (2004:6) menjelaskan, bahwa komunikasi interpersonal memiliki tujuan sebagai berikut: **Pertama**, untuk mengenal diri sendiri, yaitu berupa peluang berbicara tentang hal-hal yang disukai atau segala sesuatu yang terkait dengan dirinya. Sebagaimana diketahui keterlibatan diri dalam komunikasi interpersonal merupakan proses pengenalan dan penemuan diri sendiri. Dengan membuka diri kepada orang lain, maka yang bersangkutan akan mendapat perspektif baru tentang dirinya, sehingga dapat memahami secara lebih mendalam tentang sikap dan perilaku dirinya.

**Kedua**, untuk menemukan dunia luar, yaitu berupa peluang agar mampu mengenali dan memahami lingkungan di luar diri seseorang secara lebih baik. Sebagaimana diketahui obyek dan kejadian yang terjadi pada orang lain atau di lingkungan sekitar diri yang bersangkutan sangat menarik untuk diketahui. Setelah menemukan dunia luar, maka yang bersangkutan akan lebih mudah dalam memperbaiki kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai yang dianutnya, agar lebih kompatibel dengan dunia luar.

**Ketiga**, untuk menciptakan dan menjaga hubungan yang bermakna, yaitu berupa peluang agar mampu menjaga dan menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Sebagaimana diketahui komunikasi interpersonal menciptakan suasana hangat penuh makna, yang terjalin antara yang bersangkutan dengan orang lain berdasarkan adanya keterkaitan tertentu. Hal inilah yang menimbulkan proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

**Keempat**, untuk mengubah sikap dan tingkah laku yang bersangkutan dan orang lain, yaitu munculnya sikap dan tingkah laku yang berbeda setelah dilakukannya komunikasi interpersonal. Sebagaimana diketahui perubahan yang akan terjadi dapat berupa perubahan positif (menjadi lebih baik), maupun perubahan negatif (menjadi lebih buruk). Oleh karena itu, kedua pihak yang melakukan komunikasi interpersonal harus berupaya, agar mereka dapat berubah secara positif, misalnya dengan menyepakati nilai-nilai yang dianggap baik, benar, dan

indah, untuk kemudian mempraktekkan nilai-nilai tersebut dalam bentuk perubahan sikap dan tingkah laku.

**Kelima**, untuk bermain dan mencari hiburan, yaitu peluang untuk melakukan tukar pengalaman dan berbagi cerita berkenaan dengan masalah kehidupan, atau sekedar bercanda, bermain, dan berolahraga. Sebagaimana diketahui, komunikasi interpersonal dilakukan untuk memperoleh keseimbangan hidup, agar hidup tidak terlalu tegang dan stress. Tepatnya komunikasi ini dilakukan untuk memanfaatkan waktu rileks atau bersantai setelah kepenatan yang tinggi saat sibuk mengerjakan profesi tertentu.

**Keenam**, untuk membantu sesama, yaitu peluang untuk membujuk, melakukan konseling, konsultasi, dan memberikan motivasi. Sebagaimana diketahui, komunikasi interpersonal merupakan suatu perwujudan kepedulian seseorang terhadap orang lain, yang disalurkan atau diekspresikan dalam bentuk dukungan atau bantuan kepada orang lain.

#### d. Efektivitas Komunikasi Interpersonal

Joseph A. De Vito (dalam Thoha, 1990:187) menyatakan, bahwa efektivitas komunikasi interpersonal akan rekatif tinggi bila terlihat dari adanya hal-hal sebagai berikut: **Pertama**, keterbukaan, yaitu sikap jujur saat menanggapi stimulus yang datang. Sebagaimana diketahui sikap terbuka dalam berkomunikasi amat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan komunikasi interpersonal yang efektif. Keterbukaan dalam sikap dimaksudkan agar diri masing-masing peserta tidak tertutup dalam menerima informasi, dan ada keinginan dalam dirinya untuk menyampaikan informasi dari dirinya, bahkan informasi mengenai dirinya secara jujur.

**Kedua**, *empathy*, yaitu kemampuan merasakan hal-hal yang dialami oleh orang lain, serta memahami penderitaan dan keluhan orang lain. Selain itu, *empathy* merupakan kemampuan seseorang dalam memahami pikiran dan perasaan orang lain dengan cara menempatkan diri dalam kerangka atau bingkai psikologis orang tersebut. Sebagaimana diketahui *empathy* memiliki empat aspek utama, yaitu: (1) *perspective taking*, adalah kecenderungan seseorang untuk

mengambil sudut pandang orang lain secara spontan; (2) *fantasy*, adalah kemampuan seseorang untuk mengubah dirinya secara imajinatif agar mampu mengalami perasaan sebagaimana perasaan yang dialami orang lain; (3) *emphatic concern*, adalah perasaan simpati yang berorientasi kepada orang lain dan kemandulan yang dihadapi oleh orang lain; serta (4) *personal distress* atau *negative emphatic*, adalah kecemasan pribadi yang berorientasi pada diri sendiri serta kegelisahan dalam menghadapi setting interpersonal yang tidak menyenangkan.

**Ketiga**, dukungan, yaitu sikap yang memperlihatkan persetujuan terhadap sesuatu. Sebagaimana diketahui dukungan dapat diberikan dalam bentuk pernyataan (dengan kata-kata) dan tanpa pernyataan (tanpa kata-kata). Dukungan tanpa pernyataan nampak ketika seseorang menganggukkan kepala, mengedipkan mata, memberi senyuman, atau bertepuk-tangan.

**Keempat**, kepositifan, yaitu sikap yang diperlihatkan seseorang dalam bentuk apresiasi terhadap pandangan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya sikap positif ini dikomunikasikan kepada orang lain, sehingga membawa dampak positif pula bagi orang lain. Sikap positif inilah yang sesungguhnya juga turut memperlancar komunikasi interpersonal.

**Kelima**, kesamaan, yaitu sikap yang diperlihatkan oleh orang-orang yang berkomunikasi, bahwa mereka memiliki latar belakang dan tujuan yang sama. Sebagaimana diketahui pengenalan tak terucapkan antara lain berupa *gesture* atau sikap tubuh, yang mengakui adanya latar belakang dan tujuan yang sama, sehingga kesamaan yang ada ini perlu dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. James McCroskey, Carl Larson, dan Mark Knapp (dalam Thoha, 1990:191) menyatakan, bahwa komunikasi akan berlangsung lebih efektif bila sumber (*source*) dan penerimanya (*receiver*) berada pada kondisi homophilous. Perlu diketahui, homophilous adalah kesamaan yang ada pada sumber dan penerima saat melakukan komunikasi, misal kesamaan latar belakang, kesamaan tujuan, dan lain-lain.

#### 4. Komunikasi Organisasi

##### a. Fungsi Komunikasi Dalam Organisasi

Sasa Djuarsa Sendjaja dalam “Teori Komunikasi” (1994:136) menjelaskan, bahwa komunikasi memiliki fungsi yang teramat penting bagi suatu organisasi, terutama bagi keberlangsungan serta perkembangan organisasi tersebut. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa fungsi komunikasi dalam organisasi, sebagai berikut:

**Pertama**, fungsi informatif, yaitu ketika seluruh anggota organisasi dapat memperoleh informasi yang benar secara cepat dan mudah. Sebagaimana telah diketahui secara umum, bahwa organisasi dapat pula dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi (*information processing system*), terutama ketika informasi yang diperoleh memungkinkan anggota organisasi melaksanakan tugas dan aktivitas organisasi sebaik-baiknya.

**Kedua**, fungsi regulatif, yaitu kewenangan atasan (elit organisasi) untuk mengendalikan seluruh kegiatan organisasi, agar sesuai dengan tujuan didirikannya organisasi tersebut. Para atasan ini ditempatkan sebagai pemegang kewenangan (*position of authority*), agar kebijakannya dapat dijalankan oleh segenap anggota organisasi (bawahan) sebagaimana mestinya.

**Ketiga**, fungsi persuasif, yaitu ketika atasan, pimpinan, atau elit organisasi mampu melakukan bujukan saat berkomunikasi, agar kebijakannya dapat dijalankan oleh segenap anggota organisasi (bawahan) sebagaimana mestinya. Sebagaimana diketahui atasan tidak boleh hanya mengandalkan kekuasaan dan kewenangan dalam mengelola organisasi. Adakalanya ia juga perlu melakukan bujukan atau persuasi pada para bawahannya, dengan memberi penjelasan dan membangun kesadaran para bawahan saat berkomunikasi.

**Keempat**, fungsi integratif, yaitu kemampuan menggalang kebersamaan segenap elemen dalam organisasi, terutama ketika melakukan berbagai aktivitas, untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana diketahui setiap organisasi perlu menyediakan saluran komunikasi, yang memungkinkan anggotanya memperoleh informasi akurat, tajam, dan terpercaya. Informasi ini diperlukan para anggota organisasi sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan aktivitas organisasi.

## b. Saluran Komunikasi Dalam Organisasi

R.L. Daft (2003:142) mengungkapkan, bahwa setiap organisasi memiliki saluran komunikasi formal, yaitu saluran komunikasi yang mengalir dalam rantai komando atau rantai tanggungjawab tugas yang telah ditentukan oleh organisasi. Sementara itu, J.L. Gibson dan kawan-kawan (1997:57-59) sempat menjelaskan, bahwa saluran komunikasi formal terdiri dari:

**Pertama**, saluran komunikasi vertikal, yaitu saluran komunikasi yang terbentuk antara para atasan (elit organisasi) dengan para bawahannya (anggota organisasi). Berkaitan dengan hal ini, S.P. Robbins (1996:8) mengungkapkan, bahwa saluran komunikasi vertikal merupakan sebuah saluran komunikasi yang mengalir dari suatu tingkat dalam organisasi ke tingkat yang lebih tinggi atau ke tingkat yang lebih rendah secara timbal balik. Selanjutnya Arni Muhammad (2004:108) telah membedakan komunikasi vertikal menjadi dua bagian, yaitu: komunikasi ke bawah atau *downward communication*, dan komunikasi ke atas atau *upward communication*.

**Kedua**, saluran komunikasi horizontal, yaitu saluran komunikasi yang mempertukarkan pesan oleh dua pihak yang memiliki tingkatan yang sama dalam organisasi, misalnya antara sesama atasan (elit organisasi), dan antara sesama bawahan (anggota organisasi). Komunikasi horizontal berguna untuk menginformasikan hal penting, memperoleh dukungan, dan mengkoordinasikan aktivitas. Selain itu, komunikasi horizontal diperlukan untuk menghemat waktu dan mempercepat tindakan.

**Ketiga**, saluran komunikasi diagonal, yaitu saluran komunikasi yang dibangun dari satu pihak kepada pihak lain yang berada dalam posisi berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama, misal berbeda bidang atau bagian. Komunikasi diagonal jarang digunakan dalam organisasi, padahal komunikasi ini diperlukan untuk mengatasi kerumitan komunikasi dalam organisasi.

### c. Jenjang Komunikasi

Sebagaimana diketahui A. Pradiansyah dalam “Menciptakan Komunikasi dan Sistem SDM yang Terpadu: Mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis” (1999:8) menjelaskan, bahwa ketika atasan (elit organisasi) berbagi informasi dengan bawahan (anggota organisasi), maka hal ini berguna sebagai langkah awal melibatkan anggota dalam aktivitas organisasi. Selain itu, ketika atasan berkomunikasi dengan para bawahannya mengenai tugas dan pekerjaannya, maka sesungguhnya pada saat yang sama atasan tersebut sedang membangun keterikatan bawahan dengan pekerjaan dan aktivitas organisasi.

Lebih lanjut A. Pradiansyah (1999:9) menyatakan, bahwa ketika atasan berkomunikasi dengan para bawahannya mengenai tugas dan pekerjaannya, maka atasan tersebut juga sedang membentuk hubungan yang baik (*relationship building*). Proses pelibatan bawahan dalam aktivitas organisasi secara berturut-turut menghasilkan kesadaran (*awareness*), kemudian menghasilkan pengertian (*understanding*), dukungan (*support*), keterlibatan (*involvement*), dan akhirnya menimbulkan komitmen (*commitment*).

## **RANGKUMAN**

Sesungguhnya kegiatan pertanahan beraneka-ragam, tetapi pada beberapa tahun terakhir ini Badan Pertanahan Nasional memiliki program strategis yang terdiri dari: reforma agraria, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), dan pengadaan tanah. Sementara itu, selain reforma agraria, kegiatan yang terkait dengan *participatory mapping* dan *multipurpose cadastre* juga mendapat perhatian serius di masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini harus dikomunikasikan dengan baik oleh petugas pertanahan kepada masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan teknik komunikasi sosial.

Dalam konteks pertanahan komunikasi sosial diperlukan sebagai kegiatan komunikasi yang akan diarahkan bagi terlaksananya program dan kegiatan pertanahan. Selain itu, komunikasi sosial juga diperlukan sebagai proses untuk mempengaruhi masyarakat agar bersedia mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pertanahan. Ketika komunikasi sosial sedang berlangsung atau telah dilakukan,

maka petugas pertanahan dan masyarakat yang terlibat dalam komunikasi tersebut akan memiliki kesempatan membangun konsep dan aktualisasi diri.

Sementara itu, komunikasi interpersonal diperlukan sebagai bentuk komunikasi yang terjadi antara petugas pertanahan dengan masyarakat, yang dilakukan secara kontak langsung dalam bentuk percakapan atau dialog. Selain itu, komunikasi interpersonal diperlukan sebagai bentuk komunikasi tatap muka atau *face to face communication*, yang berlangsung antara petugas pertanahan dengan masyarakat, di mana respon masing-masing pihak yang berkomunikasi dapat diketahui secara langsung. Ada pula pandangan yang menyatakan, bahwa komunikasi interpersonal diperlukan sebagai bentuk pertukaran informasi antar petugas pertanahan, atau antara petugas pertanahan dengan masyarakat. Tidak boleh pula diabaikan pendapat yang menyatakan, bahwa komunikasi interpersonal diperlukan sebagai bentuk penyampaian berita yang dilakukan oleh petugas pertanahan kepada masyarakat.

Kompetensi interpersonal membutuhkan lima kemampuan yang harus dimiliki oleh orang yang akan berkomunikasi, yaitu: (1) kemampuan berinisiatif, (2) kemampuan bersikap terbuka atau *self-disclosure*, (3) kemampuan bersikap asertif atau mampu mengkomunikasikan hal-hal yang diinginkan dan dirasakan. (4) kemampuan memberi dukungan secara emosional, dan (5) kemampuan untuk mengatasi konflik.

Komunikasi interpersonal memiliki tujuan, antara lain: (1) untuk mengenal diri sendiri, (2) untuk menemukan dunia luar, (3) untuk menciptakan dan menjaga hubungan yang bermakna, (4) untuk mengubah sikap dan tingkah laku yang bersangkutan dan orang lain, (5) untuk bermain dan mencari hiburan, serta (6) untuk membantu sesama. Sementara itu, efektivitas komunikasi interpersonal terwujud, bila nampak hal-hal sebagai berikut: keterbukaan, *empathy*, dukungan, kepositifan, dan kesamaan.

Selain komunikasi interpersonal, juga terdapat komunikasi organisasi, yang memiliki fungsi informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Ketika komunikasi organisasi akan diaktifkan, maka tersedia saluran komunikasi vertikal, saluran komunikasi horizontal, dan saluran komunikasi diagonal. Perlu diketahui, bahwa ketika atasan berkomunikasi dengan para bawahannya mengenai tugas dan pekerjaannya, maka sesungguhnya pada saat yang sama atasan tersebut sedang membangun keterikatan bawahan dengan pekerjaan dan aktivitas organisasi.



## EVALUASI

1. Mengapa kegiatan pertanahan selalu memerlukan pelibatan masyarakat?
2. Bagaimana penerapan komunikasi sosial dalam konteks pertanahan?
3. Mengapa komunikasi interpersonal diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pertanahan?
4. Jelaskan kemampuan yang dibutuhkan dalam memenuhi kompetensi interpersonal!
5. Jelaskan tujuan komunikasi interpersonal!
6. Jelaskan fungsi komunikasi interpersonal!

## DAFTAR PUSTAKA

- Daft, R.L. 2003. "Manajemen." Jakarta, Erlangga.
- Gibson, J.L. (et.al.). 1997. "Manajemen." Jakarta, Erlangga.
- Liliweri, Alo. 1997. "Komunikasi Antar Pribadi." Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Arni. 2004. "Komunikasi Organisasi." Jakarta, Bumi Aksara.
- Nashori, Fuad. 2008. "Psikologi Sosial Islami." Bandung, Refika Aditama.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2018a. "*Participatory Mapping: Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur).*" Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2018b. "*Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah).*" Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2019. "Reforma Agraria: *Threat Dan Treatment Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).*" Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Pradiansyah, A. 1999. "Menciptakan Komunikasi dan Sistem SDM yang Terpadu: Mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis." Jakarta, Universitas Indonesia.
- Robbins, S.P. 1996. "Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi." Diterjemahkan oleh Hadyana Pujaatmaka. New Jersey, A Simon and Schuster Company.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa. 1994. "Teori Komunikasi." Jakarta, Universitas Terbuka.
- Thoha, Miftah. 1990. "Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya." Jakarta, Rajawali.